

KOMODIFIKASI *RIMPU* DALAM KONSTRUKSI POLITIK LOKAL

Hamjah Diha

hdf@hamjahdiha.org

Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 11, 2025

Revised Februari 10, 2025

Accepted Maret 23, 2025

Available online Maret 28, 2025

Kata Kunci: Komodifikasi; *Rimpu*;
Politik Lokal



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRACT

Rimpu merupakan cara berbusana masyarakat etnik Mbojo khususnya perempuan sebagai alat pengontrol dirinya dari pandangan-pandangan yang menjadikan perempuan sebagai objek. *Rimpu* juga menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat dan istimewa. Namun, di tahun 2000-an, *rimpu* hampir ditinggalkan oleh pemiliknya. Di tahun 2015-an, *rimpu* dihadirkan dalam berbagai even. Tulisan ini mengkaji bagaimana politik identitas siwe (Mbojo *rimpu*) dalam konstruksi politik lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan paradigma kajian budaya. Sedangkan teori yang digunakan adalah politik identitas dan politik lokal. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hadirnya *rimpu* diberbagai event dapat menimbulkan berbagai kepentingan, salah satunya sebagai alat komodifikasi politik lokal. Pemimpin lokal, baik itu kepala daerah maupun pemimpin budaya dapat memanfaatkan *rimpu* sebagai alat untuk menaikkan popularitas mereka. Dan pada akhirnya, tokoh yang sudah berhasil naik popularitasnya tersebut, tampil di kontestasi politik.

1. PENDAHULUAN

Rimpu merupakan cara berbusana masyarakat etnik Mbojo khususnya perempuan sebagai alat pengontrol dirinya dari pandangan-pandangan yang menjadikan perempuan sebagai objek. *Rimpu* juga menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat dan istimewa, karena salah satu penilaian masyarakat etnik Mbojo terhadap perempuan adalah dalam hal cara berpakaian dan penampilan. Secara geneologis, antara *rimpu* dan Islam tidak bisa dipisahkan. Keberadaan *rimpu* di daerah Mbojo bersamaan dengan masuknya Islam. *Rimpu* merupakan budaya adat harian tradisional yang berkembang pada masa kesultanan sebagai identitas bagi wanita muslim di Bima. *Rimpu* mulai populer sejak berdirinya Negara Islam di Bima pada tanggal 15 Rabiul Awal 1050 H bertepatan dengan tanggal 5 Juli 1640 M (Sunandari, 2010: 1). Namun, pada tahun 2000-an, *rimpu* terancam punah dan bahkan tersingkirkan di kandangnya sendiri. Hal itu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal datang dari masyarakat etnik Mbojo itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah hadirnya *fashion* terkini.

Pada tahun 2015, *rimpu* kembali hadir dengan berbagai ideologi. Etnik Mbojo mengadakan festival *rimpu* di berbagai kota dengan tujuan untuk menghidupkan kembali *rimpu* yang hampir punah tersebut. Hadirnya festival *rimpu*, tentu menimbulkan berbagai kepentingan, salah satunya komodifikasi politik lokal. Pemimpin

lokal, baik itu kepala daerah, pemodal maupun pemimpin budaya (*dou* Mbojo) memiliki andil dalam menghidupkan kembali budaya *rimpu* tersebut. Pihak-pihak inilah yang memiliki peran penting dalam menghidupkan kembali guna mendapatkan legitimasi dan pencitraan. Artinya bahwa semangat *dou* Mbojo (*lokal strong man*) menghidupkan kembali budaya *rimpu* dapat dilihat sebagai alat legitimasi dan pencitraan.

Di tahun 2018, etnik Mbojo yang ada di Jabotabek mengadakan festival *rimpu* dan yang menghadiri acara tersebut lebih kurang 10.000 perempuan yang berasal dari Bima dan Dompu (etnik Mbojo). Acara tersebut diadakan di Monas dan dihadiri oleh pejabat-pejabat di Bima dan Dompu, seperti Bupati Bima dan Bupati Dompu, dan tokoh Bima dan Dompu lainnya seperti mantan ketua MK (Handam Zoelva), dan Mantan Gubernur (Harun Al Rasyid).

Selain di Jabotabek, etnik Mbojo juga mengadakan acara festival *rimpu* di daerah Dompu. Acara tersebut diadakan pada saat festival pesona Tambora 2016. Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh Bima dan Dompu, baik yang ada di daerah Bima dan Dompu maupun yang ada di tingkat nasional. Pemimpin lokal menggunakan simbol-simbol budaya, yakni *rimpu* untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dan pencitraan. Keterlibatan pemimpin lokal (*dou* Mbojo) dalam pawai-pawai budaya, dalam hal ini pawai *rimpu* akan menguatkan posisi mereka. Fenomena ini, oleh Piere Bourdieu disebutkan sebagai modal budaya (*cultural capital*). Menurut Bourdieu, modal budaya tidak hadir dalam ruang kosong, tapi dapat mengisi struktur sosial yang lebih luas. Bourdieu melihat bahwa ada tiga jenis modal yang dapat mempengaruhi struktur sosial masyarakat, yakni modal ekonomi, modal sosial, dan modal budaya.

Modal ekonomi menurut Bourdieu bekerja melalui sumberdaya finansial, sedangkan modal sosial bekerja melalui relasi sosial yang dapat digerakkan untuk kemajuan orang, dan modal budaya adalah bekerja melalui (a) pengetahuan objektif seni dan budaya; (b) preferensi dan citarasa budaya; (c) kualifikasi formal (misal derajat akademis, ujian music, dll); (d) keterampilan budaya dan pengetahuan teknis (kemampuan memainkan alat musik); dan (e) kemampuan mendiskriminasikan dan membuat perbedaan antara yang baik dan yang buruk (Terome, 2019). Berdasarkan uraian di atas, maka penting diteliti tentang “komodifikasi *rimpu* dalam konstruksi politik lokal”. Pentingnya mengangkat tema ini mengingat semaraknya etnik Mbojo yang menghidupkan kembali budaya *rimpu* melalui pawai-pawai di saat hari-hari yang dianggap penting oleh etnik.

Rimpu

Budaya *rimpu* adalah busana atau pakaian tradisonal masyarakat *dou* Mbojo yang berkembang sejak zaman kesultanan, yakni pada tahun 1050 atau bertepatan dengan tahun 1640. *Rimpu* merupakan alat untuk menutup aurat bagi etnik Mbojo yang sudah *akil baligh*. Ada dua alasan, kenapa etnik Mbojo menggunakan *rimpu*, yaitu pertama: etnik Mbojo ingin menerjemahkan nilai-nilai agama dalam konteks lokal atau kedaerahannya, dan kedua: etnik Mbojo ingin memanfaatkan kain sarung atau kain tenun etnik Mbojo sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian etnik Mbojo. Dalam konteks ini, budaya *rimpu* etnik Mbojo merupakan hasil sebuah kearifan lokal

masyarakat Bima dan Dompu yang ingin menerjemahkan nilai-nilai agamanya (Islam) dalam konteks ke daerahan, yakni Bima dan Dompu.

Rimpu memiliki dua model penggunaan, yakni *rimpu cili* dan *rimpu colo*. Konon, dulu *rimpu* merupakan alat untuk membedahkan kaum perempuan yang masih gadis dan yang bersuami. Jika perempuan Bima dan Dompu masih gadis mereka harus menggunakan *rimpu cili*, yakni *rimpu* menggunakan dua lembar kain sarung adat Bima dan Dompu yang boleh dilihat hanya mata saja, sedangkan perempuan Bima dan Dompu yang sudah bersuami, maka mereka akan menggunakan *rimpu colo*, yakni *rimpu* yang menggunakan dua lembar kain sarung yang membiarkan bagian mukanya terbuka.

Rimpu adalah sebuah alat pembatas diri bagi kaum perempuan untuk tidak melakukan hal-hal di luar kemampuannya sebagai seorang wanita (Wardatun, 2014: 24). *Rimpu* dikatakan sebagai alat pembatas karena *rimpu* dapat menghalangi pandangan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan yang menjadikannya sebagai objek. Dalam konteks ini, *rimpu* hadir sebagai pelindung bagi kaum perempuan dari pandangan kaum laki-laki yang menjadikan kaum perempuan sebagai objek. Menurut Claudia Nef Sulaz (dalam Diha, 2017: 118) mengatakan bahwa banyak kaum perempuan yang merasa aman ketika menggunakan jilbab.

Komodifikasi Politik Lokal

Pembahasan tentang komodifikasi, maka tidak bisa lepas dari tokoh kunci, yakni Marx. Sebab, komodifikasi merupakan teori yang dicetus oleh Marx. Komodifikasi menurut Marx, sebagai proses yang mengubah nilai guna suatu benda menjadi produk pasar yang memiliki nilai tukar. Artinya bahwa nilai pada suatu benda ditentukan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Arifin (2018: 122) mengatakan bahwa komodifikasi berasal dari Marx dan neo Marxian yang menganggap bahwa nilai kegunaan suatu benda, baik abstrak maupun laten, baik manusia maupun budaya, semuanya bisa diubah menjadi produk pasar yang memiliki nilai tukar.

Beilhartz (dalam Fadillan, 2015: 158) mengatakan bahwa masyarakat borjuis, singkatnya mereduksi nilai kemanusiaan menjadi nilai ekonomis dan mereka menyeragamkan berbagai perbedaan yang mestinya menjadi karakteristik kehidupan sehari-hari. Merujuk dari pendapat tersebut, *rimpu* yang merupakan produk budaya dapat diubah menjadi nilai tukar sesuai dengan kebutuhan pasar. Artinya bahwa *rimpu* dengan wajah baru, yakni wajah sesuai dengan kebutuhan pasar, baik itu kebutuhan politik, ekonomi, dan politik identitas *dou* Mbojo.

2. METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan paradigma *cultural studies*. Paradigma penelitian *cultural studies* adalah sebuah analisis untuk memberikan makna atau membongkar ideologi yang tersembunyi di balik teks atau praktik budaya. Teks dalam pemahaman *cultural studies* tidak hanya

dimaknai teks tertulis semata, akan tetapi teks dimaknai pada seluruh praktik budaya yang memiliki makna. Dalam hal ini, *rimpu* merupakan bagian dari teks.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komodifikasi menurut Marx, sebagai proses yang mengubah nilai guna suatu benda menjadi produk pasar yang memiliki nilai tukar. Arifin (2018: 122) mengatakan bahwa komodifikasi berasal dari Marx dan neo Marxian yang menganggap bahwa nilai kegunaan suatu benda, baik abstrak maupun laten, baik manusia maupun budaya, semuanya bisa diubah menjadi produk pasar yang memiliki nilai tukar. Merujuk dari pendapat tersebut, *rimpu* yang merupakan produk budaya dapat diubah menjadi nilai tukar sesuai dengan kebutuhan pasar; *rimpu* dengan wajah baru, yakni wajah sesuai dengan kebutuhan pasar, baik itu kebutuhan politik, ekonomi, dan politik identitas *dou* Mbojo.

Kebutuhan politik misalnya, *rimpu* dapat dijadikan alat untuk mensosialisasikan diri tokoh-tokoh lokal yang punya niat untuk menjadi pemimpin atau terjun ke dunia politik kedepan. Hal itu bisa diliha beberapa gambar di bawah ini;



Gambar 1; Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Sucyati saat melakukan sosialisasi dengan masyarakat



Gambar 3 : Piagam Penghargaan dari REKOR MURI
Sumber : Fitrah



Kol
Adi
Gambar 2: Para tokoh lokal Bima-Dompu tampil saat festival *rimpu*



Gambar 4: Walikota Bima dan Jajarannya Saat Menerima Penghargaan Rakormuri
Sumber : <https://travel.detik.com>

Gambar 1 merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suyanti sedang melakukan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan *rimpu* di saat covid-19. “Mengenakan *rimpu* bagi para wanita untuk pengganti masker, bukan saja mampu menutup wajah, lebih dari itu bisa menutupi hampir seluruh badan.” (Murni Suciayati, 2020). Sedangkan 2 warga dan tokoh lokal yang sedang menggunakan *rimpu* di saat festival *rimpu*, gambar 3 piagam rekor muri dan gambar 4 pemimpin lokal yang sedang menerima rekor muri.

Gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa secara tidak langsung, *rimpu* dijadikan alat untuk menaikkan popularitas para tokoh lokal. Gambar tersebut menurut Barther dalam simiologinya merupakan sebuah tanda yang di dalamnya terdapat mitos-mitos dan ideologi beroperasi dalam teks melalui tanda-tanda. Ardiansyah (dalam Barther, 2012: 13) dalam pengantar terjemahannya pada buku Elemen-Elemen

Simiologi, Barthes menjelaskan bahwa tanda atau simbol-simbol merupakan mitos yang di dalamnya terdapat ideologi.

“Mitos muncul dalam teks pada level kode. Mitos merupakan suatu pesan yang di dalamnya terdapat ideologi berada. Sedangkan teks merupakan kumpulan tanda-tanda yang dikonstruksi (dan diinterpretasikan) dengan mengacu pada konvensi yang dihubungkan dengan suatu *genre* dan dalam medium komunikasi khusus. Tanda-tanda dan kode-kode diproduksi oleh, dan memproduksi, mitos-mitos kultural,” (Ardiansyah dalam Barthes, 2012: 13).

Selain gambar tersebut, pada acara “Tambora Menyapa Dunia” pemerintah Kabupaten Dompu berhasil menyelenggarakan festival *rimpu*, dan mengumpulkan massa yang sangat banyak, sehingga Kabupaten Dompu dan Bupati Dompu berhasil mendapatkan “REKOR MURI”. Tambora Menyapa Dunia merupakan peringatan 200 (dua ratus tahun) tahun meletusnya Gunung Tambora tahun 1815 yang terjadi dua abad yang lalu. Pada acara tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu menggelar “Pawai *Rimpu*” yang diikuti oleh 13.000 orang masyarakat Dompu. Disbudpar NTB Prov, (2020) memberitakan bahwa even tersebut merupakan catatan MURI yang ke 6881.

“Event ini merupakan catatan MURI yang ke 6881, dan ini untuk yang pertama kali, Rekor ini belum pernah ada sebelumnya. MURI memberikan tiga piagam penghargaan, masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Dompu selaku penyelenggara kegiatan, Bupati Dompu, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu selaku pengagas acara ini,” (DisbudparNTBProv, 2020).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, dapat diketahui perkembangan di tahun 2015-an, bahwa *rimpu* ditransformasi dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Akibat dari transformasi tersebut, menempel berbagai ideologi baru. Ideologi-ideologi baru tersebut, muncul dari semangat masyarakat etnik Mbojo melakukan festival *rimpu* ataupun kegiatan sejenisnya. Dalam festival *rimpu* tersebut, terselip berbagai kepentingan yang dapat dijadikan oleh bosisme untuk memuluskan keinginannya. Di tahun 2015-an, *rimpu* telah menjadi *trend*, yang turut menjadi penyemangat para bosisme untuk membangkitkan kembali *rimpu* dengan ideologi baru, baik itu ideologi kapitalis, politik, maupun gaya hidup (*fashion*). Menurut Hendra, Peneliti Sosial-Budaya Kabupaten Bima yang berhasil diwawancara mengatakan bahwa sebagai berikut:

“*Rimpu* sekarang sudah bergeser maknanya. Dalam artian bahwa *rimpu* yang dulunya dijadikan alat penutup aurat, sekarang sudah bergeser jadi “gaya hidup”. Maksudnya, ideologi ke-Islaman di saat adakan festival itu sudah tidak ada, hanya saja festival *rimpu* itu murni menyosialisasikan bahwa ini loh budaya kita dulu (*rimpu* itu),” (Hendra dalam wawancara, 13 Maret 2020.)

Selain Hendra, Fahrurizki dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2020 juga mengatakan bahwa festival *rimpu* hadir dengan ideologi baru. *Rimpu* yang berkembang saat ini di luar fungsi utamanya, yakni sebagai alat penutup aurat. *Rimpu* hanya dijadikan sebagai untuk menaikkan popularitas tokoh semata, seperti apa yang dikatakannya berikut ini:

“Saya melihat satu contoh event cetak rekor muri *rimpu* Kota Bima kemarin, pengumpulan massa setiap kelurahan hanya diikuti oleh para pendukung semata, jika pun di instansi mereka otomatis mengikuti perintah atasan., begitu

juga siswa yang mengikuti perintah kepala sekolah. Dan itu hanya menaikkan popularitas semata,” (Fahrurizki dalam wawancara pada tanggal 20 Mei 2020.)

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa *rimpu* menjadi bagian dari alat untuk menaikkan popularitas kepala daerah dan jajarannya. Selain itu, *rimpu* juga komoditas yang diproduksi secara massa sehingga mengakibatkan *rimpu* menjadi “budaya massa atau budaya pop”. Dengan demikian, *rimpu* telah hadir sebagai alat untuk menaikkan popularitas tokoh melalui even-even budaya. Tokoh-tokoh lokal yang berhasil naik secara popularitas kemudian tampil dalam konteks pilkada. Seperti contoh misalnya, Haji Ihtiar (HI), pada tahun 2017, di mana pada tahun itu pemerintah Kabupaten Dompu berhasil mengumpulkan massa sekitar 13.000 orang. Pada saat itu pula, HI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu.

Pemanfaatan simbol-simbol budaya (busana *rimpu*) untuk kepentingan pribadi dalam hal ini menaikkan popularitas sebagai modal untuk tampil dalam politik praktis merupakan gambaran yang menggambarkan tentang hasrat produksi barang dan jasa yang sangat tinggi dalam masyarakat kapitalis. Busana *rimpu* tidak lagi dipandang sebagai budaya lokal yang memiliki nilai guna dan nilai fungsi, melainkan dimaknai sebagai komoditas yang memiliki nilai tukar. Dalam kalimat lain bahwa busana *rimpu* tidak lagi dipandang sebagai warisan budaya yang memiliki nilai fungsi dan nilai guna (sebagai alat lindung kehormatan kaum perempuan), melainkan bermakna sebagai komoditas politik lokal yang memiliki nilai “tukar”; busana *rimpu* yang memiliki nilai religi, namun, kini tergantikan dengan nilai pasar politik dengan daya tukarnya dalam kontestasi politik.

Komodifikasi adalah proses terjadinya perubahan barang atau layanan yang sebelumnya mengikuti aturan sosial non-pasar menjadi suatu subjek yang mengikuti aturan pasar (Peter K Gleick dalam Irianto, 2016: 216). Busana *rimpu* merupakan budaya lokal etnik Mbojo yang memiliki aturan sosial dan religi (non-pasar), kini tergantikan dengan nilai tukar yang mengikuti aturan pasar. Dalam kalimat lain bahwa busana *rimpu* dijadikan alat untuk mengumpulkan massa yang sangat banyak, yang secara otomatis tokoh yang menyelenggarakan festival *rimpu* tersebut dapat menaikkan popularitasnya.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadirnya *rimpu* diberbagai event dapat menimbulkan berbagai kepentingan, salah satunya sebagai alat komodifikasi politik lokal. Pemimpin lokal, baik itu kepala daerah maupun pemimpin budaya dapat memanfaatkan *rimpu* sebagai alat untuk menaikkan popularitas mereka. Dan pada akhirnya, tokoh yang sudah berhasil naik popularitasnya tersebut, tampil di kontestasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Tommy Satriadi Nur.2018. *Sastra dalam Media Massa, Budaya dalam Komodifikasi*. Jurnal Komunikasi P-ISSN: 1907-898X, E-ISSN: 2548-7647 Volume 13, Nomor 1, Oktober 2018

-
- Barthes, Roland. 2012. *Elemen-Elemen Semiologi; Sistem Tanda Bahasa, Hermeneutika, dan Strukturalisme*. Jogjakarta. IRCiSoD
- Diha, Hamjah. 2016. *Infiltrasi budaya: Globalisasi dan Modernitas dalam Ruang Budaya Mbojo*. Mataram-NTB Yayasan Hamjah Diha bekerjasama dengan REFORM INSTITUTE for Social research
- Disbudpar. 2015. *Pawai Rimpu Tambora Menyapa Dunia Memecahkan Rekor Muri*. | 7
<https://www.disbudpar.ntbprov.go.id/pawai-rimpu-tambora-menyapa-dunia-memecahkan-rekor-muri/> . Di akses pada tanggal. 20 Agustus 2020
- Fadillah, Dani. 2015. Komodifikasi Seksual dalam kepentingan ekonomi portal berita online. *Informasi Kajian Ilmu Komunikasi*. Volume 45. Nomor 2. Desember 2015. Hal 155-162
- Irianto, Agus Maladi. 2016. *Komodifikasi Budaya di Era Ekonomi Global Terhadap Kearifan Lokal; Studi Kasus Eksistensi Industri Parawisata dan Kesenian Tradisional di Jawa Tengah*. JURNAL THEOLOGIA — Volume 27, Nomor 1, Juni 2016
- Sundari, Yayi, 2010. *Rimpu Mbojo yang Nyaris Kehilangan Makna*. Wednesday, 14 April 2010. <https://bimacenter.com>
- Wardatun, Atun. 2014. *Perempuan NTB Mendunia, Siapa Takut?*. Mataram. Leppim